

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 1, 2020 | Hal. 104 - 118

INVESTASI PARIWISATA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN PANGANDARAN, JAWA BARAT

Beta Budisetyorini¹, Situmorang Debora Febriana², Annisa Dwi Febrianty³, Andreas

Ega Dinar Adiatma⁴, Jamilah⁵, Odang Permana⁶, Lilis Jayanti⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

¹Email: beta@stp-bandung.ac.id

²Email: febriana.debora22@gmail.com

³Email: annisadwi2799@gmail.com

⁴Email: andreasega31@gmail.com

⁵Email: meelalatuconsina@gmail.com

⁶Email: oopsmangad@gmail.com

⁷Email: lilisjayanti77@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diresmikan pada tahun 2012 dan mulai aktif tahun 2013. Sebagai DOB, Kabupaten Pangandaran menunjukkan pertumbuhan ekonomi meningkat positif dengan PDRB rata – rata 4.95% per tahun dan untuk sektor pariwisata berkontribusi rata – rata 8.49% dari total PDRB pada periode 2013 - 2018. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan investasi, khususnya sektor pariwisata baik itu investasi pemerintah maupun swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh investasi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran pada periode tahun 2016-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kausalitas dengan pendekatan kuantitatif serta teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa investasi pemerintah sektor pariwisata secara parsial belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran, dimana pengaruhnya senilai 0,58%. Sementara investasi swasta pada sektor pariwisata secara parsial mengindikasikan pengaruh negatif senilai -0.05%. Namun demikian untuk investasi pemerintah dan swasta secara simultan pada sektor pariwisata berpengaruh positif senilai 8.5% terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran.

Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Pariwisata, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta

Abstract

Pangandaran Regency becoming autonomous region officially since 2012 and active in 2013. It has shown average increasing number in Regional GDP 4.95% and tourism sector contributed 8.49% per year in 2013 – 2018. The tourism investment development has

stimulated government and private sector involvement to improve Pangandaran Regency as tourism destination. This research aims to measure the influence of tourism investment contribution to Pangandaran Regency economic growth during period 2016 – 2018. The research methodology use causality and quantitative approach with multiple linear regression technic analysis. The result shown that government tourism investment has not been significantly contribute to the Pangandaran Regency economic growth and indicated by 0.58%. Mean a while for private tourism investment has negative influence of -0.05%. However, the influence of government and private investment in tourism sector simultaneously could contribute 8.5% for Pangandaran Regency economic growth.

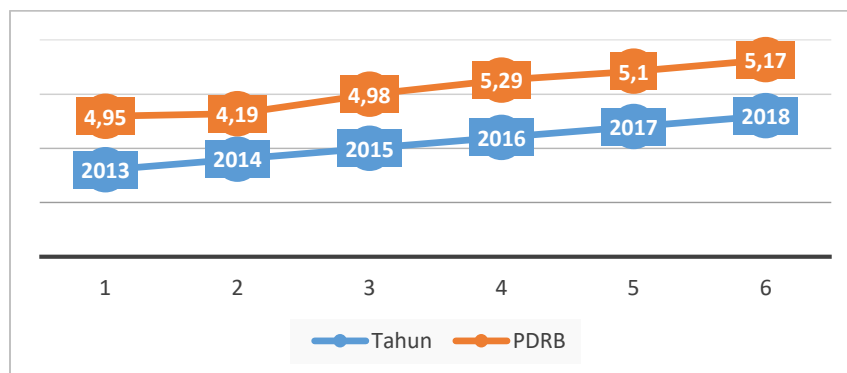
Keywords : *Economic Growth, Tourism Investment, Government Investment, Private Investment.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami kenaikan dari periode sebelumnya.

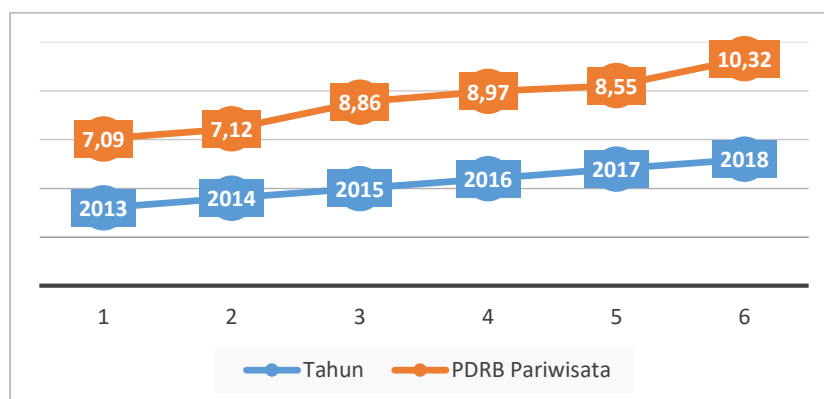
Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pasti ditopang oleh investasi. Salah satu daerah yang meningkat pertumbuhannya adalah Kabupaten Pangandaran. Meskipun Kabupaten Pangandaran adalah Daerah Otonom Baru (DOB) yang diresmikan pada tahun 2012 dan aktif di tahun 2013, namun pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan positif setiap tahun termasuk sektor pariwisata, yang dapat dilihat pada gambar 1 dan 2.

Gambar 1
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2013 – 2018 (dalam %)



Sumber: BAPPEDA Kab. Pangandaran, 2019

Gambar 2
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 – 2018 (dalam %)



Sumber: BAPPEDA Kab. Pangandaran, 2019

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2014 salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran adalah pusat pertumbuhan ekonomi

berbasis sektor pariwisata sebagai unggulannya. Potensi sektor pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pangandaran yaitu sebanyak 243 destinasi wisata dengan daya tarik berupa wisata alam, budaya dan buatan. Namun, saat ini baru 5 (lima) destinasi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, yaitu Pantai Batu Hiu, Pantai Karapyak, Green Canyon, Pantai Batu Karas dan Pantai Pangandaran. Kemudian terdapat destinasi yang dikelola oleh Perhutani dan BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) yaitu Cagar Alam Pananjung, Pantai Karang Nini, Citumang, dan Curug Bojong. Sementara sisanya dikelola oleh Pemerintah Desa atau kelompok masyarakat. Dengan potensi yang ada, maka Kabupaten Pangandaran saat ini sedang gencar – gencarnya menggiatkan pembangunan dalam sektor pariwisata.

Selain itu pengembangan usaha akomodasi pun semakin meningkat terdapat 218 akomodasi dan 25 akomodasi tersebut telah mendapat sertifikasi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta terdapat 209 usaha makan dan minum (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2019).

Untuk melakukan pembangunan di sektor pariwisata tersebut, maka diperlukan investasi. Investasi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah dapat dilihat dari besaran pengeluaran pemerintah, salah satunya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat pemerintah daerah. Selain investasi pemerintah, investasi swasta juga diperlukan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Investasi pemerintah pada sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran juga telah dilakukan melalui pembangunan fisik. Salah satu alokasi APBD untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah melalui program pembangunan fisik destinasi wisata diantaranya yaitu Penataan Daerah Tujuan Wisata Pantai Madasari, Penataan Daerah Tujuan Wisata *Green Canyon*, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana *Green Canyon* Dermaga I, Penataan Kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur Pangandaran. Berikut pada tabel 1 alokasi APBD pembangunan fisik sektor pariwisata.

Tabel 1
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sektor Pariwisata
Pembangunan Fisik Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2018

Tahun	APBD	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah
2016	Rp. 779,345,535	Rp. 1,686,770,000	Rp. 2,466,115,535
2017	Rp. 248,831,568	Rp. 1,500,000,000	Rp. 1,748,831,568
2018	Rp. 162,002,000	Rp. 2,334,235,000	Rp. 2,496,237,000

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Pangandaran 2019

Pada Tabel 1 tersebut bahwa investasi pemerintah pada sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 investasi pemerintah pada sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan, karena fokus pembangunan pemerintah pada tahun itu adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, sehingga alokasi APBD untuk sektor lain seperti sektor pariwisata mengalami pengurangan anggaran dan belum menjadi prioritas.

Sementara investasi pemerintah sektor pariwisata yang di alokasikan untuk pembangunan non fisik digunakan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan pelaku industri pariwisata lainnya melalui kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Pembangunan non fisik ini baru pertama kali dilakukan per tahun 2019. Hal ini didasari akan kesadaran pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

setempat bahwa pembangunan sektor pariwisata bukan hanya pembangunan sektor fisik, tetapi perlu juga ditunjang oleh pentingnya investasi pembangunan sumber daya manusia. Berikut pada tabel 2 alokasi APBD pembangunan non fisik sektor pariwisata.

Tabel 2

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sektor Pariwisata Pembangunan Non Fisik Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

Tahun	APBD	Jumlah
1	Kegiatan Pelatihan Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata	Rp. 652.170.000
2	Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	
3	Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Alam Selancar	
4	Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Alam Balawisata (Lifeguard)	
5	Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Alam Caving/Susur Gua	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Pangandaran 2019

Untuk gambaran investasi swasta pada sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain: (1) Pembangunan infrastruktur Kabupaten Pangandaran secara optimal, sehingga kabupaten ini memiliki nilai strategis bagi investor; (2) Adanya deregulasi dan debirokratisasi di sektor penanaman modal; (3) Kabupaten Pangandaran sebagai Kawasan Strategis Provinsi Penanganan Ekonomi berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Jawa Barat 2009-2029; (4) Pangandaran memiliki diversifikasi produk wisata. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2018

Tahun	Jumlah
2016	Rp. 30.084.100.000
2017	Rp. 33.840.000.000
2018	Rp. 44.140.051.500

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Pangandaran, 2019

Berdasarkan kondisi perkembangan investasi pariwisata di Kabupaten Pangandaran yang terus dilakukan baik dalam bentuk investasi pemerintah dan investasi swasta (PMDN) sejak tahun 2016 hingga 2018, maka diperlukan kajian terhadap seberapa besar pengaruh investasi pariwisata tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran.

Menurut Jamailah (2018), dengan meningkatnya nilai investasi maka akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu merujuk pada penelitian terdahulu oleh Wahyuningsih (2010) mengatakan bahwa investasi pemerintah dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku. Kemudian menurut Ardana (2017) dikatakan bahwa investasi pemerintah dan investasi kapital di sektor pariwisata serta total

pengeluaran wisatawan domestik dan internasional mampu memberikan dampak positif pertumbuhan ekonomi di negara APEC pada periode 2010-2015.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi investasi pariwisata dilihat dari nilai pengaruh investasi pemerintah dan swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh investasi pemerintah sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana pengaruh investasi swasta sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran?

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran meningkat. (Sadono Sukirno dalam Windy, 2018). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atau output barang dan jasa (Mankiw, 2009). Jika PDB suatu negara meningkat, maka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut juga meningkat. Kemudian, jika PDB suatu daerah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut pun meningkat. Berikut merupakan persamaan identitas dari PDB.

$$Y = C + I + G + NX$$

Keterangan

Y : PDB

C : Konsumsi

I : Investasi

G : Pengeluaran Pemerintah

Nx : Net Ekspor

Investasi, Investasi Pemerintah dan Swasta, Investasi Pariwisata

Investasi adalah penanaman sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Abdul Halim dalam Fahmi, 2009). Investasi dilakukan untuk menambah faktor produksi sehingga dapat meningkatkan produksi barang dan jasa di masa depan.

Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat (atau pemerintah daerah) dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu (Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah). Suparmoko dalam Fahmi (2013) menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam suatu negara dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pembangunan pemerintah.

Investasi pemerintah dapat dilihat dari besaran pengeluaran pemerintah salah satunya melalui alokasi belanja modal pada APBN di tingkat pemerintah pusat dan APBD di tingkat pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2003, struktur APBN dan APBD terbagi atas sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja modal atau investasi merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dimana pemerintah wajib ikut serta dalam meningkatkan

perekonomian secara umum terutama perekonomian daerah.

Dalam sektor pariwisata, investasi pemerintah dapat terlihat dari besaran nilai APBD yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan pariwisata, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik dapat berupa pengembangan daya tarik wisata, pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata dan peningkatan kualitas serta kuantitas infrastruktur pendukung aksesibilitas pariwisata. Sementara pembangunan non fisik dapat berupa peningkatan kualitas tata kelola dan stakeholder di destinasi pariwisata, serta kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui program pelatihan dan bimbingan teknis.

Investasi Swasta adalah penempatan dana dan / atau barang (penanaman modal) oleh pihak swasta seperti perusahaan. Investasi swasta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) bagi investor, tidak seperti investasi pemerintah yang bertujuan untuk manfaat (*benefit*) dan pelayanan bagi masyarakat. Investasi swasta dapat bersumber dari 2 jenis yaitu PMDN dan PMA. Dalam sektor pariwisata, investasi swasta dapat berupa pembangunan di aspek amenities pariwisata seperti pembangunan akomodasi, pembangunan tempat makan dan minuman, pembangunan daya tarik wisata buatan, usaha biro perjalanan, usaha konsultan pariwisata dan lain-lain, yang akhirnya dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Dalam penelitian ini, investasi difokuskan pada investasi sektor pariwisata. Investasi pariwisata merupakan penanaman modal yang dilakukan secara khusus dalam sektor pariwisata yang bertujuan untuk mengembangkan destinasi dan usaha pariwisata. Dalam hal ini investasi pariwisata dapat berupa pembangunan fisik terhadap komponen - komponen produk pariwisata seperti atraksi, amenities dan aksesibilitas. Juga dapat berupa pembangunan non fisik seperti pengembangan stakeholder dan tata kelola destinasi serta kualitas sumber daya manusia pariwisata.

Hubungan Investasi Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Afdi (2011), kegiatan pariwisata memiliki dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian. Dampak langsung ini dapat diukur melalui tingkat belanja devisa pariwisata dan dampaknya terhadap tersedianya lapangan kerja. Sementara dampak tidak langsung meliputi pengukuran efek yang ditimbulkan terhadap pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Dalam jangka panjang, efek pariwisata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat diidentifikasi melalui beberapa saluran yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- Pariwisata adalah penghasil devisa yang cukup besar, yang tersedia untuk pembayaran barang-barang atau bahan baku dasar yang diimpor yang digunakan dalam proses produksi. ^[11]_[SEP]
- Pariwisata memainkan peranan penting dalam mendorong investasi pada infrastruktur baru dan persaingan antar perusahaan lokal dengan perusahaan di negara turis lainnya. ^[12]_[SEP]
- Pariwisata menstimulasi industri lainnya, baik secara langsung dan tidak langsung maupun efek stimulasi.
- Pariwisata memberikan kontribusi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan efek jangka panjang pariwisata diatas, pariwisata memiliki peran ^[13]_[SEP] penting dalam mendorong adanya investasi. Dengan adanya peningkatan investasi ini maka akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru, yang pada tahap selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Sutawijaya, 2010).

Menurut Jamaliah (2018) pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari investasi, hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan. Semakin besar investasi maka semakin besar tingkat pertumbuhan yang bisa dicapai, sebaliknya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin besar pendapatan yang dapat ditabung dan diinvestasikan, ini merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan investasi ini dapat menghimpun modal dengan membangun sejumlah infrastruktur yang dapat berguna bagi kegiatan produksi (Yandiles, 2014). Dalam sektor pariwisata, investasi ini dapat berupa penanaman modal pada usaha-usaha pariwisata seperti hotel, restoran, taman rekreasi, ataupun untuk infrastruktur penunjang pariwisata. Dengan adanya peningkatan kemampuan memproduksi barang dan jasa pada bidang pariwisata ini maka dapat menggerakkan sektor pariwisata yang kemudian dapat membuka lapangan dan kesempatan kerja. Dengan terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas dan peningkatan produksi barang dan jasa, maka tahapan selanjutnya pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian terdahulu tentang hubungan investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dan negara menunjukkan kecenderungan adanya pengaruh positif. Adapun variable yang diteliti antara lain meliputi investasi pemerintah, investasi swasta, PMA, PMDN, dan tenaga kerja. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Penelitian Terdahulu

	Investasi Swasta	PMA	PMDN	Investasi Pemerintah	Tenaga Kerja
1	Nizar, Hamzah, dan Syahnur, 2013				
	N/A	Positif	N/A	Positif	Positif
2	Yuliarni, Sukarsa, dan Wahyuni, 2014				
	Positif	N/A	N/A	Positif	N/A
3	Windy, 2018				
	N/A	Positif	Positif	Positif	Positif
4	Wahyuningsih, 2010				
	N/A	Positif	Negatif	Positif	Positif
5	Suindyah, 2011				
	Positif	N/A	N/A	Positif	N/A

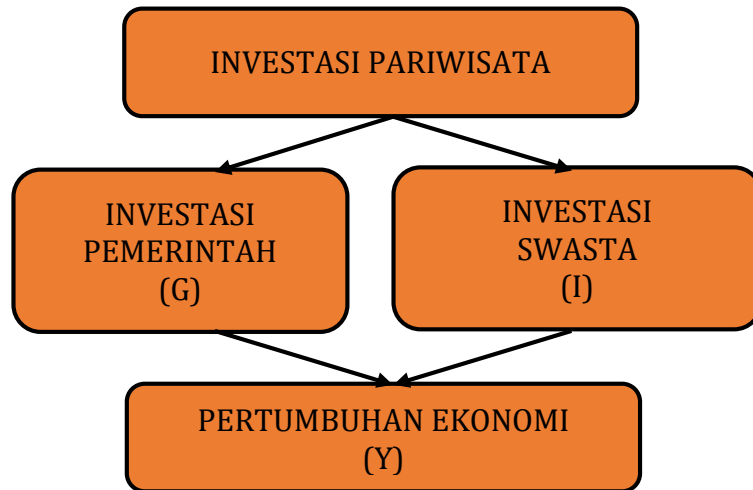
Sumber: Peneliti, 2019

Sementara kajian tentang hubungan investasi pariwisata dengan pertumbuhan ekonomi masih jarang dilakukan. Penelitian pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi negara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) periode 2010 – 2015 menunjukkan variable investasi pemerintah, investasi kapital dan total pengeluaran wisatawan domestik dan internasional telah mampu memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara – negara tersebut (Ardana, 2017).

Sedangkan dalam penelitian ini, investasi sektor pariwisata dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan variable dan indikator dimensi yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya di bidang pariwisata yaitu investasi pemerintah dan swasta.

Kerangka Pemikiran

Gambar 3
Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti, 2019

Hipotesis Penelitian

H_0 : Investasi Pemerintah (G) dan Investasi Swasta (I) dalam sektor pariwisata tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Kabupaten Pangandaran.

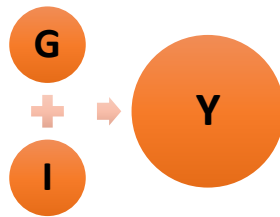
H_a : Investasi Pemerintah (G) dan Investasi Swasta (I) dalam sektor pariwisata berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Kabupaten Pangandaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Kausalitas merupakan metode penelitian untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya (Siregar, 2013). Dengan kata lain, kausalitas mempertanyakan masalah sebab akibat. Karena itu dalam penelitian ini terdapat variabel independen (mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data-data numerik dan diolah menggunakan metode statistik.

Penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis pengaruh Investasi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran. Variabel independen dalam penelitian ini adalah investasi pariwisata, yang terbagi menjadi dua variabel yaitu investasi pemerintah (G) dan investasi swasta (I). Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (Y). Adapun paradigma penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut:

Gambar 4
Paradigma Penelitian



Sumber: Peneliti 2019

Y = Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangandaran
 G = Investasi Pemerintah_[SEP]
 I = Investasi Swasta

Adapun bentuk persamaannya yang di tulis secara model ekonometrika adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 G + \beta_2 I + e_t$$

Dimana:

- Y = Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pangandaran
- β_0 = Konstanta
- β_1 dan β_2 = Koefisien Regresi_[SEP]
- G = Investasi Pemerintah
- I = Investasi Swasta
- E = *Error Term*_[SEP]
- T = Periode

Dalam matriks operasionalisasi variable independen dan dependen menggunakan skala rasio dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

Tabel 5
Matriks Operasionalisasi Variable

Variabel	Dimensi	Indikator
Investasi Pemerintah (G)	Besaran investasi pemerintah sektor pariwisata Kab. Pangandaran	APBD Sektor Pariwisata
Investasi Swasta (I)	Besaran PMA dan PMDN Sektor Pariwisata Kab. Pangandaran	PMTB Sektor Pariwisata
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Laju Perubahan Nilai Ekonomi di Kab. Pangandaran	PDRB

Sumber: Peneliti, 2019

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data *Time Series* perbulan periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 (2016.1 – 2018.12) dengan total 36 sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan

alat kumpul data yaitu berupa data sekunder atau dokumen. Dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti, antara lain :

- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran.
- Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran.
- Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pangandaran.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan metode analisis kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square* atau OLS) dengan alat pengujian data yaitu *software Eviews 10*. Teknis analisis dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu Uji Asumsi Klasik (Uji Stasioneritas), perhitungan regresi linear berganda, pengujian masalah regresi dan pengujian statistik. Unit analisis dalam penelitian ini, antara lain :

- BPS Kabupaten Ciamis
- Bappeda Kabupaten Pangandaran
- DPMTSP Kabupaten Pangandaran
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Stasioneritas dengan Unit Root Test, variabel G dan variabel I memenuhi syarat kriteria stasioner pada tingkat *level*. Sedangkan variabel Y memenuhi kriteria stasioner pada tingkat *second different*.

Perhitungan regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$D(Y,2) = 36763245 + 0.578337 G - 0.056132 I$$

Analisis Intersep

Nilai Intersep dilihat dari angka koefisien konstanta yaitu sebesar 36763245, artinya jika tidak ada investasi pemerintah dan investasi swasta sektor pariwisata, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran akan tumbuh sebesar 36763245.

Analisis Koefisien Investasi Pemerintah (G)

Koefisien Investasi Pemerintah sebesar 0,58 artinya jika investasi pemerintah sektor pariwisata naik 1% maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran akan naik 0.58% *ceteris paribus* (*ceteris paribus* berarti hanya variable G yg berubah sementara variabel bebas lainnya tetap).

Analisis Koefisien Investasi Swasta (I)

Koefisien Investasi Swasta (I) sebesar -0.056132 (dibulatkan menjadi -0,05, artinya jika investasi swasta sektor pariwisata naik 1% maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran akan turun sebesar 0,05% *ceteris paribus*).

Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel G dan I adalah lebih kecil dari 10, yaitu 1,000093. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas di dalam variabel penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji White menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari $Obs \cdot R\text{-squared}$ adalah lebih besar dari 0.05, yaitu sebesar 0.6119. Hal ini berarti model yang digunakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin Watson menunjukkan bahwa nilai DW-hitung yaitu: 2.548710. Dibandingkan dengan nilai DW-tabel berdasarkan ketentuan maka dapat dilihat nilai DW-hitung berada diantara dU dan 4-dU. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil Uji Koefisien Determinasi yang dilakukan diperoleh nilai koefisien R^2 adalah sebesar 0.085. Hal ini berarti dalam model regresi ini, variabel investasi pemerintah (G) dan variabel investasi swasta (I) berpengaruh sebesar 8,5% terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Pangandaran. Sedangkan 91,5% pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji t-statistik

Hasil Uji t-statistik diperoleh nilai t-hitung variabel G sebesar 1,35 dan variabel I sebesar -1,05. Apabila dibandingkan dengan nilai t-tabel berdasarkan ketentuan $df_{(\alpha, n-k)} = df_{(0,05, 33)} = 2,021$, maka dapat dilihat bahwa nilai t-hitung < t-tabel, sehingga disimpulkan bahwa variabel G dan variabel I secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Hasil Uji F-statistik diperoleh nilai F hitung sebesar 1,447177. Jika nilai ini dibandingkan dengan nilai F tabel berdasarkan ketentuan $F_{(\alpha, k-1, n-k)} = F_{(0,05, 2, 33)} = 19,48$, maka dapat dilihat nilai F hitung < F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (G dan I) secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, maka diperoleh hasil bahwa investasi pemerintah (G) dan investasi swasta (I) sektor pariwisata berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Pangandaran.

Investasi pemerintah (G) sektor pariwisata secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Pangandaran pada periode tahun 2016 – 2018, pengaruhnya hanya sebesar 0,58%. Hal ini disebabkan karena terdapat sektor lain yang menjadi prioritas yaitu pada sektor kesehatan dan pendidikan dengan alokasi APBD dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Perbandingan Alokasi APBD Kabupaten Pangandaran
Pada Sektor Pariwisata, Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2016 – 2018

Sektor	2016 (rupiah)	2017 (rupiah)	2018 (rupiah)	Total (rupiah)
Pariwisata	2.466.115.535	1.748.831.568	2.496.237.000	6.711.184.103
Pendidikan	429.382.312.429	466.244.392.405	392.696.838.001	1.288.323.542.835
Kesehatan	132.853.218.697	193.007.975.857	199.661.221.072	525.522.415.626

Sumber : Disparbud Kab. Pangandaran 2019 dan BPS Kab. Ciamis 2019

Investasi swasta (I) sektor pariwisata secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Pangandaran pada periode tahun 2016 – 2018, karena terjadi arah pengaruh yang negatif yaitu sebesar -0,05%. Pengaruh investasi swasta sektor pariwisata jika dibandingkan investasi pemerintah justru

lebih buruk, karena jika investasi swasta sektor pariwisata ditambah hal ini justru akan membuat penurunan pertumbuhan ekonomi.

Investasi pemerintah (G) dan investasi swasta (I) sektor pariwisata secara bersama - sama berpengaruh tidak signifikan sebesar 8.5% terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) Kabupaten Pangandaran pada periode tahun 2016 – 2018. Hal ini karena pengaruh antara investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran harus dilihat dari nilai investasi seluruh sektor perekonomian yang ada di daerah tersebut, tidak terbatas hanya pada investasi sektor pariwisata saja. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya variabel lain sebesar 91.5% yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran, selain investasi pariwisata. Kemudian mengingat bahwa investasi pariwisata merupakan investasi jangka panjang yang pengaruhnya baru dapat dirasakan dalam periode antara 5 – 10 tahun. Sehingga investasi pariwisata kurang dapat dilihat pengaruhnya dalam jangka pendek, akan lebih jelas pengaruhnya jika diteliti dalam jangka waktu yang panjang.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa investasi pariwisata pada investasi pemerintah (G) berpengaruh positif tidak signifikan, sedangkan investasi swasta (I) berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan gabungan investasi pemerintah dan swasta (G+I) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran pada periode tahun 2016 – 2018.

Pengaruh investasi pemerintah dalam sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran berpengaruh positif tidak signifikan. Hal ini disebabkan anggaran yang dialokasikan pemerintah setempat terhadap sektor pariwisata masih dalam tahapan kegiatan investasi berbentuk renovasi dan penataan destinasi, sehingga belum dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat setempat. Selain itu sebagai kabupaten yang baru aktif menjalankan fungsi pemerintahan sejak tahun 2013, ada skala prioritas investasi yang dilakukan pemerintah. Anggaran investasi pemerintah Kabupaten Pangandaran pada periode 2016-2018 diprioritaskan dan lebih difokuskan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Pengaruh investasi swasta pada sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran berpengaruh negatif tidak signifikan. Hal ini disebabkan adanya perizinan yang belum efektif dan efisien bagi investor. Selain itu, investasi tidak dapat dilihat pengaruhnya dalam jangka waktu yang pendek. Investasi dapat dilihat pengaruhnya secara lebih jelas dalam jangka waktu yang panjang.

Pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta sektor pariwisata secara bersama - sama berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran. Hal ini karena pengaruh antara investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran harus dilihat dari nilai investasi seluruh sektor perekonomian yang ada di daerah tersebut, tidak terbatas hanya pada investasi sektor pariwisata saja.

Hasil penelitian ini tidak mendukung konsep yang menyatakan bahwa investasi pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya investasi swasta (PMDN). Hal ini dapat disebabkan juga karena penelitian ini memiliki keterbatasan ketersediaan data di lapangan mengingat Kabupaten Pangandaran baru secara aktif menjalankan fungsi pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) sejak tahun 2013. Sehingga data yang diperoleh peneliti berupa data tiga tahun (2016 – 2018) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sektor Pariwisata, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Sektor Pariwisata, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang kemudian dikonversi menjadi data bulanan mulai dari Januari 2016 sampai dengan Desember 2018

dengan metode interpolasi data.

Meskipun demikian penelitian ini memberikan implikasi untuk penelitian selanjutnya tentang investasi pariwisata sebaiknya dilakukan pada suatu daerah yang pengembangan pariwisatanya minimal sudah berjalan dengan kegiatan investasi pemerintah dan swasta selama 5 – 10 tahun untuk mengukur dampak investasi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdi, Muhammad. 2011. *Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan. Universitas Tanjungpura.
- Ardana, Adhitya K. 2017. *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Periode 2010-2015*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Diah dan Ali. 2013. *Analisis Pengaruh Sektor Moneter dan Sektor Riil Terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia (Periode 2005:III-2012:IV)*. Jurnal Media Trend Vol.8 No.11, Universitas Trunojoyo Madura.
- Fahmi, Ilham dkk. 2009. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fakta News. 2017. *2017 Pariwisata Naik dari Nomor 4 Ke Nomor 2 Penyumbang Devisa Terbesar*. <https://fakta.news/berita/2017-pariwisata-naik-dari-nomor-4-ke-nomor-2-penyumbang-devisa-terbesar>. Diakses pada (25 Juli 2019).
- Farida, Ai Siti. 2011. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Gujarati dan Porter. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemb Empat.
- Harapan Rakyat. 2017. *Iklim Investasi di Pangandaran Naik*. <https://www.google.com/amp/s/www.harapanrakyat.com/2017/04/iklim-investasi-di-pangandaran-naik/amp/>.
- Irma, Lisa dkk. 2015. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung*. Jurnal Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Jamaliah. 2018. *Hubungan Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi dengan Investasi di Kota Pontianak*. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.7, No. 1, 20-32.
- Mankiw N, Gregory. 2009. *Macroeconomics*. 7th Edition. New York: Worth Publishers.
- Nizar, C., Hamzah, A., Syahnur, S. 2013. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Panjaitan. 2013. *Analisis Pengaruh Perekonomian Terbuka Terhadap Inflasi di Indonesia (Periode 2005:07 - 2012:06)*. Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung.
- Pemerintah Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2007 Tentang Investasi Pemerintah*.
- Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*.
- Raharja, Hendra. 2017. *Ukuran Sampel Penelitian yang Memenuhi Syarat Menurut Para*

Ahli.

- Raharjo, Adi. 2006. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Anggaran Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
- Rustiono, Deddy. 2008. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah*. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan.
- Saifan, Lailan dkk. 2011. *Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja di Sumatra Utara*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 11.
- Silvia, Engla dkk. 2013. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Inflasi di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi Januari 2013, Vol. 1, No. 02.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri
- Suindyah, Sayekti. 2011. *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal EKUITAS vol.15 no.4 Desember 2011 : 477-500.
- Sutawijaya, A., dan Zulfahmi. 2010. *Pengaruh Ekspor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980 – 2006*. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol 6 (1): 14-27.
- Wahyuningsih, Tri. 2010. *Dampak Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Maluku*. Jurnal Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Iqra Buru Maluku.
- Windy, Puspasari. 2018. *Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Yandiles dkk. 2014. *Analisis Pengaruh Investasi Swasta, Pengeluaran Pemerintah, dan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bitung*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Yuliarni, N., Sukarsa, M., Wahyuni, I.G.A. 2014. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Zahrani, M. 2017. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi*. Jurnal of Economics and Bussines, Vol 1, No.1.
- Zulkarnain, Ahmad. 2018. *Pengaruh PDRB, PMA dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Lampung*. Skripsi. Universitas Lampung.